



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JL. RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

Telp. : 86902313 Facs : 86902314

Website : www.pta-jakarta.go.id Email : ptajakarta2007@yahoo.co.id

Nomor : W9-A/2467/Kp.04.1/6/2022
Lampiran : satu dokumen
Hal : **Ketentuan Usul Kenaikan Pangkat Hakim
Periode 1 Oktober 2022**

20 Juni 2022

Yth.

1. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
 2. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
 3. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara
- di

JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2733/DJA.2/KP.04.1/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2022, dengan ini diminta untuk menyampaikan daftar usul kenaikan pangkat hakim periode 1 Oktober 2022 dan melengkapi dokumen persyaratan-persyaratan elektronik serta kode penamaan dokumen elektronik (sebagaimana terlampir) yang dikumpulkan dalam satu folder sesuai dengan nama yang akan naik pangkat dan diterima paling lambat tanggal 22 Juni 2022 via *email* (ptadkijakarta@gmail.com) / *link google drive*.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Assalam,

T U A

H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

NIP. 19560306 198603 1 004

Lampiran Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/2467/Kp.04.1/6/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

**DOKUMEN PERSYARATAN DAN KODE PENAMAAN DOKUMEN ELEKTRONIK
USUL KENAIKAN PANGKAT HAKIM PERIODE 1 OKTOBER 2022**

No.	Nama Dokumen	Kode Dokumen	Kode Penamaan Dokumen
1.	Surat Keputusan CPNS (bagi Hakim yang akan naik pangkat pertama kali)	SKCP	SKCP_NIP Baru.pdf
2.	Surat Keputusan PNS (bagi Hakim yang akan naik pangkat pertama kali)	SKPN	SKPN_NIP Baru.pdf
3.	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SKKP	SKKP_NIP Baru.pdf
4.	Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja (bila ada)	SKPMK	SKPMK_[NIP Baru].pdf
5.	SK Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan	SKLANTIK	SKLANTIK_NIP Baru.pdf
6.	Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan atau SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)	BASUMPJAB	BASUMPJAB_[NIP Baru].pdf
7.	SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Atasan Langsung	SK ATASAN	SK ATASAN_NIP Baru.pdf
8.	SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir (2020)	SKP2THN	SKP2THN_NIP Baru.pdf
9.	SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir (2021)	SKP1THN	SKP1THN_NIP Baru.pdf
10.	Izin Pencantuman Gelar Pendidikan (dari BKN/Kantor Regional BKN, bila ada)	SRTPG	SRTPG_NIP Baru.pdf

Catatan :

Dikumpulkan dalam satu folder sesuai dengan nama yang akan naik pangkat dan diterima paling lambat tanggal 22 Juni 2022 via email (ptadkijakarta@gmail.com) / link google drive



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 By Pass Jakarta Pusat 10510
Telepon (021) 29079177 Faksimile (021) 29079277, 29079211
Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id
e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2733/DJA/KP.04.1/6/2022 3 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Pemberitahuan Usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2022

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia; dan
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, bersama ini kami sampaikan daftar nama pimpinan dan hakim di lingkungan peradilan agama yang telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan kenaikan jabatan dan pangkat periode 1 Oktober 2022, sebagaimana Lampiran I Surat.

Dalam rangka memperlancar proses penerbitan Keputusan Presiden/Surat Keputusan tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dimaksud, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat pimpinan dan hakim peradilan agama yang belum tercantum dalam Lampiran I Surat, namun telah memenuhi persyaratan usul kenaikan jabatan dan pangkat, maka segera mengajukan usulan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara hierarki;
2. Berkas persyaratan usul kenaikan jabatan dan pangkat hakim periode 1 Oktober 2022, sebagai berikut:
 - a) Asli/salinan sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b) SK Penyesuaian Masa Kerja (bila ada);
 - c) Asli/salinan sah SK Mutasi Jabatan terakhir;
 - d) Asli/salinan sah Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) mutasi jabatan terakhir;
 - e) Asli/salinan sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2021;
 - f) Asli/salinan sah Surat Pemberian Izin Pencantuman Gelar Pendidikan dari BKN/ Kanreg BKN (bila ada).
3. Kenaikan jabatan dan pangkat periode 1 Oktober 2022, bagi hakim yang:
 - a) Terhalang oleh pangkat atasan, akan tetap diproses, selanjutnya menjadi kewenangan BKN;
 - b) Terhalang karena kelas pengadilan, akan diproses setelah Hakim tersebut dimutasi ke kelas pengadilan yang lebih tinggi.
4. Pencantuman Gelar Pendidikan tidak dapat diusulkan bersamaan dengan usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, dikarenakan Pencantuman Gelar Pendidikan dalam SK Kenaikan Pangkat harus mendapat Izin Pencantuman Gelar Pendidikan dari BKN terlebih dahulu;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE



5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung akan memproses usul kenaikan jabatan dan pangkat hakim peradilan agama ke BKN, setelah data kepegawaian pimpinan dan hakim peradilan agama di SAPK BKN valid, dan dokumen persyaratan yang diunggah ke Docu Digital BKN dinyatakan lengkap.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami minta kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh agar memerintahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian di satker masing-masing untuk:

- Melakukan verifikasi dan validasi daftar pimpinan dan hakim peradilan agama di wilayah hukum masing-masing, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung ke alamat surat elektronik: mutasihakim.badilag@gmail.com, paling lambat tanggal **24 Juni 2022**.
- Melakukan peremajaan/pemutakhiran data kepegawaian pimpinan dan hakim yang akan diusulkan kenaikan jabatan dan pangkat pada aplikasi SAPK BKN dan SIKEP MA, paling lambat tanggal **24 Juni 2022**;
- Menggunggah dokumen elektronik persyaratan kenaikan jabatan dan pangkat hakim peradilan agama ke aplikasi pendukung unggah dan unduh dokumen elektronik BKN, melalui <http://docudigital.bkn.go.id>, sebagaimana petunjuk penulisan kode penamaan dokumen elektronik pada Lampiran II Surat, paling lambat tanggal **30 Juni 2022**.
- Melaporkan kembali ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, apabila terdapat perubahan data pimpinan dan hakim yang akan diusulkan kenaikan jabatan dan pangkat.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth.:

- Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia;
- Hakim yang bersangkutan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE



NO.	NIP	NAMA	TMT G/R	G/R	JABATAN	SATKER	KELAS	WILAYAH HUKUM	KETERANGAN	
31	19750712.20 0502.1.001	Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.	01/10/2018	IV/a	Hakim Madya Pratama	Wakil Ketua	PA. KAYU AGUNG	IB	PTA PALEMBANG	-
32	19750827.20 0604.1.003	Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.	01/10/2018	IV/a	Hakim Madya Pratama	Wakil Ketua	PA. BATURAJA	IB	PTA PALEMBANG	-
33	19661130.19 9203.1.003	Drs. H. Dudung, S.H., M.H.	01/10/2018	IV/d	Hakim Utama Muda	Hakim Tinggi	PTA BANGKA BELITUNG	-	PTA BANGKA BELITUNG	-
34	19671210.19 9403.1.003	Drs. H. Husin, M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. SUNGAILIAT	IB	PTA BANGKA BELITUNG	TERHALANG KELAS PENGADILAN IB
35	19641107.19 9403.1.002	Drs. Ahmad Nur, M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. METRO	IA	PTA BANDAR LAMPUNG	-
36	19620401.19 9403.1.001	Drs. Aripin, S.H., M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. TANJUNG KARANG	IA	PTA BANDAR LAMPUNG	-
37	19640505.19 9402.1.001	Drs. Aminuddin	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. METRO	IA	PTA BANDAR LAMPUNG	-
38	19621231.19 9403.2.013	Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Ketua	PA. GUNUNG SUGIH	IB	PTA BANDAR LAMPUNG	TERHALANG KELAS PENGADILAN IB
39	19780322.20 0704.1.001	Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.	01/10/2018	III/d	Hakim Pratama Utama	Wakil Ketua	PA. MESUJI	II	PTA BANDAR LAMPUNG	-
40	19660412.19 9403.2.001	Dra. Haniah, M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. JAKARTA PUSAT	IA	PTA JAKARTA	-
41	19630317.19 9203.2.002	Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. JAKARTA SELATAN	IA	PTA JAKARTA	-
42	19631227.19 9303.1.004	Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. JAKARTA SELATAN	IA	PTA JAKARTA	-
43	19670107.19 9403.1.005	Drs. Suyadi, M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. JAKARTA SELATAN	IA	PTA JAKARTA	-
44	19680517.19 9303.1.004	Drs. Amri, S.H., M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. JAKARTA UTARA	IA	PTA JAKARTA	-
45	19671225.19 9403.1.005	Drs. Samoto, M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. JAKARTA UTARA	IA	PTA JAKARTA	-
46	19681229.19 9403.1.005	Drs. H. Gunawan, M.H.	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Wakil Ketua	PA. JAKARTA PUSAT	IA	PTA JAKARTA	-
47	19631214.19 8903.2.003	Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si.	01/10/2018	IV/d	Hakim Utama Muda	Hakim Tinggi	PTA BANTEN	-	PTA BANTEN	-
48	19591119.19 9403.2.002	Dra. Hj. Asnita	01/10/2018	IV/c	Hakim Madya Utama	Hakim	PA. TIGARAKSA	IA	PTA BANTEN	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

